

## ***THE HISTORY OF THE DIVISION TEBO REGENCY IN JAMBI PROVINCE (1999-2015)***

Kevin Reza\*, Drs. Kamaruddin Oemar, M.Si\*\*, Drs. Tugiman, MS\*\*\*  
Email: kevinreza81@gmail.com, kamaruddin@gmail.com, tugiman\_unri@yahoo.com  
Cp: 082371099101, 081270434105, 081275590882

*History Education Studies Program  
Education Departement of Social Science  
Faculty of Teacher Training and Education  
University of Riau*

**Abstract:** *The institution of a certain administration of an area is always needed in order to achieve good governance and provide services for people's welfare in accordance with the ability of each area for its growth and development process. Every region in the world has its own history in terms of the establishment process, area naming and the development of the area which make it unique. This also happened in Tebo Regency in Jambi Province, which is an area that instituted in the reformation period. The purpose of this research is to discover the division history of Tebo regency, to know past trips Tebo Regency before it become regency in 1999, to know background the division of Tebo Regency, to know early condition after becoming regency and to know supporting and hindering factors of the division process Tebo Regency in Jambi Province. The method used in this research is the historical method, where data were collected through observation, interviews, literature study and documentation. Data analysis used in this research is descriptive analysis. The location of the research is in Tebo Regency in Province Jambi. The time of research is spanned from the proposal seminar up to thesis seminar. The results show Tebo Regency has a long history background. The area has occupied before The Dutch colony entered this area. In 1906 The Dutch colony began to set the it to be Afdeeling area of Dutch East Indies Government. The division process of Tebo Regency got positive response from local government and received a magnitude of public aspiration for institution of Tebo area to be regency. The processes finally get the results with the enactment law No. 54 of 1999 about formation of Sarolangun Regency, Tebo Regency, Muaro Jambi Regency and East Tanjung Jabung Regency. Tebo Regency was officially born in 12 October 1999.*

**Key Words :** *History, Tebo Regency, Division*

## SEJARAH PEMEKARAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI (1999-2015)

Kevin Reza\*, Drs. Kamaruddin, M.Si\*\*, Drs. Tugiman, MS\*\*\*  
Email: kevinreza81@gmail.com, kamaruddin@gmail.com, tugiman\_unri@yahoo.com  
Cp: 082371099101, 081270434105, 081275590882

Program Studi Pendidikan Sejarah  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Pembentukan suatu daerah selalu dibutuhkan guna mencapai pemerintahan dan pelayanan yang baik untuk kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dalam proses pembangunan dan pertumbuhan daerah. Setiap daerah yang ada di dunia ini tentulah memiliki sejarah tersendiri baik itu dalam hal proses pembentukan, pemberian nama dan juga perkembangan dari daerah tersebut yang tentunya berbeda dari daerah yang lainnya sehingga membuat hal itu unik. Begitu juga Kabupaten Tebo Provinsi Jambi merupakan daerah yang dibentuk pada masa reformasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah terbentuknya Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, untuk mengetahui perjalanan masa lalu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi hingga menjadi sebuah kabupaten pada tahun 1999, untuk mengetahui latar belakang pemekaran Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, untuk mengetahui kondisi awal Kabupaten Tebo Provinsi Jambi setelah pemekaran, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pemekaran Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Metode yang digunakan adalah historis (sejarah), dimana data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Adapun lokasi penelitiannya yaitu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Waktu penelitian dilakukan dari seminar proposal sampai dengan ujian skripsi. Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten Tebo memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Daerah ini sudah dihuni jauh sebelum bangsa asing memasuki kawasan ini, setelah kedatangan bangsa asing maka mulailah ditetapkan pada tahun 1906 kawasan ini sebagai daerah Afdeeling pemerintah Hindia Belanda. Proses Kabupaten Tebo dalam memekarkan daerahnya mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah dan besarnya aspirasi masyarakat untuk memekarkan daerah Kabupaten Tebo menjadi sebuah kabupaten. Proses tersebut akhirnya mendapatkan hasil dengan dikeluarkannya UU Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tebo akhirnya lahir pada tanggal 12 Oktober 1999.

**Kata Kunci :** Sejarah, Kabupaten Tebo, Pemekaran

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan suatu daerah berdampak besar dalam kehidupan kita masing-masing. Keberadaan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam percepatan pembangunan, makin banyak jumlah kota, kabupaten, kecamatan atau desa maka makin membuka kesempatan suatu daerah untuk berkembang dalam segala bidang, sehingga tidak heran bila melihat suatu daerah harus selalu memikirkan pemekaran wilayahnya. Daerah yang berkembang akan berdampak baik bagi masyarakatnya dalam berbagai faktor.

Pembangunan daerah yang lebih baik dapat dilaksanakan dengan memekarkan suatu daerah. Era otonomi daerah berkembang pesat sejak era reformasi. Jatuhnya Orde Baru dan munculnya reformasi membuka peluang bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat memberi ruang kepada pemerintah daerah menata daerahnya sendiri.

Kabupaten Tebo merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Jambi yang memiliki kesempatan untuk menata daerahnya sendiri. Kabupaten Tebo merupakan kabupaten yang masih baru tumbuh dan berkembang menjadi kabupaten yang besar. Berdirinya pada tahun 1999 hingga akhir 2015 banyak usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan Kabupaten Tebo. Kabupaten Tebo memiliki cerita sejarah sendiri. Pada masa kesultanan Jambi dan masa perang kemerdekaan, Muara Tebo yang merupakan ibukota kabupaten memegang peranan penting dalam menentang penjajahan Belanda.

Kabupaten Tebo kaya akan sumber daya alam dan bisa dijadikan daerah perikanan tawar karena dilewati oleh sungai terbesar di Provinsi Jambi yaitu Sungai Batanghari serta merupakan daerah rawa dataran rendah. Potensi sumber daya alam Tebo ini masih banyak yang dapat dikembangkan dalam perjalanan pembangunan sebagai Kabupaten yang masih muda berdiri.

Potensi Kabupaten Tebo ini sangat disayangkan dimana kekayaan sumber daya alam tersebut belum menjadikan daerah ini sejahtera. Hal ini disebabkan selain karena masih suatu kabupaten yang baru berkembang serta kurangnya perhatian pemerintah dalam mengelola potensi-potensi sumber daya alam tersebut. Contoh kecilnya seperti sektor pariwisata. Tebo banyak memiliki potensi wisata dan warisan budaya, namun budaya dan potensi wisata itu belum tergalai dan malahan sebagian besar budaya sejarah masa lalu itu terabaikan dan tidak diketahui oleh generasi muda-mudi sekarang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Historis (sejarah). Penelitian historis adalah penelitian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena masa lalu (historis) yang meliputi kegiatan penyelidikan, pemahaman dan penjelasan keadaan yang telah lalu. Tujuannya adalah melakukan rekonstruksi fenomena masa lalu secara sistematis, obyektif dan akurat untuk menjelaskan fenomena masa sekarang atau mengantisipasi fenomena masa yang akan datang.

Winarno Surachman (dalam bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik) menyatakan “sebuah metode dapat disebut historis atau dokumenter bila penyelidikan ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui

sumber dokumen. Pada umumnya metode historis berlangsung mengikuti pola sebagai berikut: pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data dan penyusunan data.<sup>1</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perjalanan Masa Lalu Kabupaten Tebo Sebelum Pemekaran

#### 1. Masa Hindu Budha

Dalam konteks wilayah geografis, Kabupaten Tebo mengacu pada wilayah bekas kerajaan-kerajaan pada masa lampau yang mendapat pengaruh kebudayaan Hindu Budha. Ternyata Kabupaten Tebo memiliki sedikit unggulan budaya berupa candi di Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo Ulu dan juga arca di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, sebagai monumental kebudayaan dari masanya. Sayangnya penelitian ke arah itu secara arkeologi belum terlaksana. Karenanya masa Hindu Budha di Kabupaten Tebo hanya bersumber dari literatur-literatur sejarah.

Salah satu dari literatur itu menyebutkan, bahwa kerajaan Ho-lo-tan pernah mengirim utusan ke negeri Cina pada tahun-tahun 420, 433, 434, 436, 437 dan 452.<sup>2</sup> Kerajaan Ho-lo-tan tersebut dalam sejarah Dinasti Sung (960-1280) dikatakan terletak di She-po atau Tehu-po, sedangkan menurut pendapat Sartono (1978), She-po atau Tehu-po itu dianggap sama dengan Tebo sekarang ini, yakni Muara Tebo.<sup>3</sup> Hal ini dapat dijadikan alasan sebagai awal masa Hindu Budha di Kabupaten Tebo. Di Muara Sungai Batang Hari berdiri sebuah kerajaan baru bernama Melayu yang berdampingan dengan Kerajaan Sriwijaya di Sungai Musi. Kerajaan Melayu tersebut telah berubah nama menjadi Kerajaan Swarnabhumi. Kerajaan ini awalnya dikuasai oleh Kerajaan Singosari, namun perang pamalayu yang dikemukakan Singosari tampaknya berujung perdamaian. Sekembalinya pasukan Singosari membawa dua orang puteri melayu yaitu Dara Petak dan Dara Jingga. Anak dari Dara Jingga kelak akan menjadi raja Kerajaan Dharmasraya.

#### 2. Sebelum Masa Kemerdekaan

##### a. Zaman Kerajaan

##### 1) Adityawarman

Sebagai langkah pertama setelah Adityawarman dinobatkan sebagai Raja Dharmasraya, ia memindahkan pusat kerajaannya ke daerah Tanah Datar, Pagaruyung, Batusangkar, ke dalam daerah Minangkabau. Dengan demikian muncullah Kerajaan Minangkabau dan Adityawarman adalah rajanya yang pertama.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Winarno Surachman. 1982. Dikutip oleh Yeni Desmalisa(Skripsi). 2010. *Sejarah Lahirnya Kabupaten Lingga Provinsi Riau tahun 1999-2003*. Pendidikan Sejarah,FKIP, Universitas Riau(UR). Hal 27.

<sup>2</sup> Muljana, Slamet. 1981. *Kuntala, Sriwijaya dan Swarnabhumi*. Jakarta: Yayasan Idayu. Hal 20

<sup>3</sup> Saudagar, Fachruddin. 1992. *Perkembangan Kerajaan Melayu Kuno di Jambi*. Jambi: Pemda Tingkat I Jambi. Hal 207

<sup>4</sup> Muljana, Slamet. 1983. *Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit*. Jakarta: Inti Idayu Press. Hal 181

## 2) Puteri Selaro Pinang Masak

Melalui Silsilah Pernyatuan Raja-Raja Minangkabau, Adityawarman yang lahir tahun 1247, menjadi raja bermula di Dharmasraya dan berakhir di Pagaruyung (1247-1347). Selanjutnya digantikan oleh anaknya Ananggawarman (1347-1417).<sup>5</sup> Puteri Selaro Pinang Masak diperkirakan adalah anak cucu Ananggawarman yang kemudian dirajakan oleh masyarakat Jambi dengan tempat persemayamannya di Ujung Jabung. Puteri Selaro Pinang Masak juga menerima penyerahan kekuasaan dari Tun Talanai yang berkedudukan di Dendang, Muara Sabak.

### b. Zaman Kesultanan

Sultan pertama dari Kesultanan Melayu Jambi adalah Pangeran Kedah, gelar Sultan Keramat atau Sultan Abdul Kahar<sup>6</sup>. Sedangkan sultan terakhir yang diakui rakyat Jambi adalah Pangeran Ratu Ningrat, gelar Sultan Thaha Syaifuddin bin Sultan Muhammad Fachruddin tahun 1885-1904. Sultan Thaha Syaifuddin ini dimakamkan di Muara Tebo, Jambi. Ia juga merupakan seorang Pahlawan Nasional dan namanya juga diabadikan untuk Bandar Udara Sultan Thaha di Jambi.

### c. Zaman Penjajahan Belanda

Tahun 1906 Kesultanan Jambi ditetapkan menjadi sebuah Karesidenan di bawah Pemerintah Hindia Belanda. Dengan ditetapkannya Kesultanan Jambi sebagai sebuah Karesidenan di bawah pemerintahan Hindia Belanda maka wilayah Muara Tebo oleh Pemerintah Hindia Belanda dijadikan sebagai sebuah wilayah yang disebut *Afdeeling*. Dengan demikian Belanda mulai berkuasa di Muara Tebo sejak tahun 1906. Di samping itu Belanda berusaha merangkul kaum pribumi yang terpelajar dan yang berpengaruh. Jabatan yang disediakan bagi kaum pribumi terpelajar dan berpengaruh itu adalah sebagai Kepala Distrik (Kewedanaan), disebut Demang, sedangkan untuk Onder Distrik (Kecamatan) disebut Assisten Demang. Muara Tebo dibagi menjadi 7 marga atau batin yaitu Petajen Hulu, Petajen Hilir, Tabir Hilir, IX Kota, VII Kota, Sumai dan Jujuhan (pada tahun 1934 marga Jujuhan dimasukkan dalam wilayah administrasi Muara Bungo).

### d. Zaman Penjajahan Jepang

Muara Tebo diduduki Jepang tanggal 2 Maret 1942.<sup>7</sup> Di Muara Tebo, tentara Jepang dibagi dalam dua pasukan, pertama ditujukan ke Pulau Musang untuk menyerang pertahanan Belanda, dipimpin Kolonel Namora yang kemudian gugur dalam pertempuran dan yang menyerbu Jambi dipimpin oleh Kapten Orita. Jambi dapat diduduki Jepang tanggal 4 Maret 1942. Jepang benar-benar membawa malapetaka. Jepang memerintah dengan keras dan kejam. Rakyat yang melawan dipukul, bahkan ada yang dibunuh. Dengan alasan untuk kepentingan melawan musuh, Jepang mengambil padi rakyat. Rakyat dipaksa menanam ubi kayu sebagai pengganti beras. Segala kegiatan itu membuat rakyat kemiskinan dan kelaparan. Mengenai sistem pemerintahan Jepang tidak jauh berbeda dengan pemerintahan Belanda. Hanya istilahnya saja yang

<sup>5</sup> Sidi Maharajo, Suhaimi. 1993. *Kerajaan Dharmasraya*. Batang Arau Batipuah Baruah: Limbago. Hal 2

<sup>6</sup> Mukti, Zubir. 1987. *Sejarah Peranan Hukum Adat dan Adat Istiadat Jambi*. Muara Bungo. Hal 29-30

<sup>7</sup> Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. 1983. *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Jambi*. Jakarta: Proyek-proyek dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Hal 72

berbeda. Karesidenan di masa Jepang disebut dengan Jambi-Syu. Istilah Afdeeling diganti dengan Busyu. Muara Tebo merupakan salah satu Busyu di Jambi-Syu. Dibawah Busyu ada Gunco, selanjutnya Fuku Gunco, Pasirah, Penghulu atau Kepala Kampung.

### **3. Masa Kemerdekaan**

Selama pendudukan Jepang dan terutama saat menjelang kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, kaum pergerakan di Muara Tebo tidak tinggal diam. Mereka memonitor situasi melalui radio gelap, yang saat itu sangat berbahaya, karena dilarang keras oleh Jepang. Jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kemudian Jepang menyerah kalah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, cepat diketahui, di Muara Tebo yang pertama kali mengetahuinya adalah dr. Syahriar Rahman.<sup>8</sup> Tanggal 19 Agustus 1945 bendera merah putih dinaikkan di Kota Muara Bungo, pada hari berikutnya bendera merah putih dikibarkan di Muara Tebo. Upacara pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh dr. Syahriar Rahman di depan kantor Gun Co Muara Tebo. Penarikan bendera merah putih tidak diikuti dengan Indonesia Raya, tapi dengan pekikan perjuangan “merdeka” tiga kali.

Selanjutnya setelah bebas dari segala penjajahan dan memasuki babak baru, penduduk Muara Tebo membangun masa depan yang menanti. Pemerintahan pun ditata kembali. Sebelumnya dalam keputusan PDRI No. 3/UP/PDRI Kota Muara Tebo merupakan ibukota Kabupaten Muara Tebo. Kemudian diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 Muara Tebo menjadi bagian dari Kabupaten Merangin selama 2,5 tahun. Karena Ibukotanya dipindah ke Bangko. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Kabupaten Merangin dimekarkan lagi menjadi 2 Kabupaten, yakni Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo, dimana Wilayah Muara Tebo menjadi bagian dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo.

Di masa Orde Baru keluar keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 136-936 tentang Pembentukan dua Wilayah Pembantu Bupati Kabupaten Tebo, yakni Pembantu Bupati Wilayah Barat dan Pembantu Wilayah Timur. Pembantu Wilayah Barat berkedudukan di Lubuk Landai. Sedangkan Pembantu Wilayah Timur berkedudukan di Muara Tebo. Wilayah Pembantu Timur inilah yang kemudian akan menjadi Kabupaten Tebo.

## **Latar Belakang Pemekaran Kabupaten Tebo Provinsi Jambi**

### **1. Aspirasi dan Musyawarah Masyarakat di Kabupaten Tebo**

Dalam rangka rencana pemekaran Kabupaten Tebo, masyarakat sangat mendukung akan terwujudnya hal tersebut. Di Kecamatan Tebo Tengah aspirasi masyarakat dalam memperjuangkan pemekaran Kabupaten Tebo ini didasarkan atas

---

<sup>8</sup> DHC Angkatan 45 Bungo Tebo. 1995. *Rakyat Bungo Tebo Berjuang Mempertahankan Kemerdekaan*. Muara Bungo. DHC Angkatan 45 Dati II Bungo Tebo. Hal 18

keputusan bersama antara tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda lingkungan Muara Tebo. Begitu pula masyarakat di kecamatan lainnya saat itu seperti Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan Pembantu Sumay dan Kecamatan Pembantu VII Koto.

Keinginan untuk memekarkan wilayah Pemerintahan Bungo Tebo sudah terjadi pada tahun 1989 sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 136/936 Tahun 1989 Tentang Pembentukan Wilayah-Wilayah Kerja Pembantu Bupati Dalam Wilayah Kerja Pembantu Bupati Dalam Kabupaten Bungo Tebo. Kabupaten Bungo Tebo terbagi atas dua wilayah yaitu Pembantu Wilayah Barat dan Pembantu Wilayah Timur. Pembantu Wilayah Timur berkedudukan di Muara Tebo.<sup>9</sup> Melihat aspirasi masyarakat yang begitu antusias maka diadakan musyawarah yang bertempat di Aula Kantor Camat Tebo Tengah pada hari Senin tanggal 10 Mei 1999 jam 20:00 WIB.

Pada tanggal 10 Mei 1999 Masyarakat Tebo Tengah menyatakan sikap dengan mengeluarkan Pernyataan Aspirasi Masyarakat Tentang Pemekaran Wilayah Daerah Tingkat II Bungo Tebo. Esok harinya tanggal 11 Mei 1999, Masyarakat Kecamatan Tebo Ilir di Sungai Bengkal, Masyarakat Pembantu Kecamatan Sumay di Teluk Singkawang, Masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang di wirotho Agung, Masyarakat Kecamatan Pembantu VII Koto di Sungai Abang dan Kecamatan Tebo Ulu di Pulau Temiang juga menyatakan sikap serupa yakni meminta Pemekaran Kabupaten Bungo Tebo.

## **2. Pelaksanaan Hasil Musyawarah dan Lahirnya Kabupaten Tebo**

Memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang serta dampak dari reformasi yang bergulir akhirnya wakil rakyat mendukung rencana pemekaran dengan mengeluarkan Keputusan DPRD Daerah Tingkat II Bungo Tebo tanggal 21 Mei No. 05 Tahun 1999 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Daerah Tingkat II Bungo Tebo dan pada hari yang sama DPRD Bungo Tebo juga mengeluarkan Surat Dukungan Pemekaran Nomor 170/271/1999 Tanggal 21 Mei 1999 yang ditandatangani oleh Syahril Basir sebagai Ketua dan H. Asan Jani, S.Ag dan Drs. H. AD Sayuti sebagai Wakil Ketua.

Akhirnya dikeluarkanlah Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi 135/2465/Pem Tanggal 10 Juli Tahun 1999 tentang rencana pemekaran wilayah Kabupaten dalam Propinsi Jambi. Rencana pemekaran ini juga diperkuat dengan Keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/1999 Tanggal 9 Juli 1999 Tentang Pemekaran Kabupaten di Provinsi Jambi menjadi 9 kabupaten dan 1 kota. Terbitnya Surat Gubernur Jambi tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Bungo Tebo Drs. H. Sofian Ali dengan mengambil kebijaksanaan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bungo Tebo Nomor 669 Tahun 1999 Tentang Tim Pelaksanaan Penerapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kabupaten Bungo Tebo. Menurut M. Hatta S.Sos, pada saat pemekaran Kabupaten Bungo Tebo waktu itu beliau menjabat sebagai Camat Jujuhan dimana kecamatan Jujuhan ini akan menjadi bagian dari Kabupaten Bungo mengatakan bahwa Drs. H. Sofian Ali sebagai Bupati Bungo Tebo sebenarnya menginginkan pemekaran Kabupaten Bungo Tebo bukan hanya menjadi

---

<sup>9</sup> Pemda Bungo Tebo. 1999. *Pemantapan Data Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo menjadi Daerah Tingkat II Bungo dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tebo*. Muara Bungo : Pemda Bungo Tebo. Hal 4-5

Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo tetapi juga menginginkan berdirinya Kota Madya Bungo. Akan tetapi hal itu tidak terwujud sehingga hanya Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo saja yang dimekarkan.<sup>10</sup>

Keinginan Masyarakat Tebo untuk mempunyai pemerintahan kabupaten sendiri akhirnya terealisasi, pada tanggal 4 Oktober 1999 Presiden Republik Indonesia Ke-3 BJ. Habibie mengesahkan Pemekaran Kabupaten Bungo Tebo dengan ditandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Pasal 17 diatur bahwa Pejabat Bupati Tebo pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan Gubernur Jambi. Keputusan dalam mengisi kekosongan Kepala Daerah Kabupaten Tebo maka Gubernur Jambi Drs. H. Abdurrahman Sayoety mengusulkan Drs. H. A. Madjid Mu'az. MM untuk menjadi Carateker Bupati di Kabupaten Tebo.

Menurut Bapak Madjid Mu'az mengatakan bahwa beliau diberitahukan agar datang ke rumah Pak Gubernur. Sesampainya disana beliau langsung ditunjuk sebagai Bupati Kabupaten Tebo. Beliau disuruh untuk mempersiapkan kemeja putih untuk pelantikannya. Pak Madjid Mu'az mengatakan bahwa lebih enak menjadi Carateker dari Kabupaten maupun Provinsi hanya menyediakan kemeja putih saja tanpa mengeluarkan biaya untuk hal lainnya.<sup>11</sup> Pada tanggal 12 Oktober 1999, Drs. H. A. Madjid Mu'az. MM dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interim Jenderal (Purn) Feisal Tanjung di Jakarta. Pelantikan tersebut bersamaan dengan penandatanganan prasasti berdirinya Kabupaten Tebo. Bersamaan dengan itu disepakati bahwa lahirnya Kabupaten Tebo yaitu pada tanggal 12 Oktober 1999.

### **Kondisi Awal Kabupaten Tebo**

Tebo adalah sebuah nama Kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi. Ibukotanya adalah Muara Tebo. Konon nama Tebo ini lahir dari beberapa versi cerita masyarakat. Daerah Tebo tepatnya di pinggir sungai Batang Tebo terdapat pohon yang mirip dengan pohon tebu. Pohon ini dinamakan Tebrau oleh masyarakat melayu disana, sedangkan pendatang dari Cina mengatakan pohon itu dengan nama pohon Tebo. Versi lain mengatakan bahwa nama Tebo berarti Tiba (datang) yakni bahwa Muara Tebo yang merupakan persimpangan antara Sungai Batang Hari dan Batang Tebo di mana dahulunya sungai-sungai tersebut merupakan jalur lalu lintas perdagangan antara pedagang dari Sumatera Barat dan pedagang dari Jambi. Jika antara pedagang ini bertemu di muara sungai tersebut yang menjadi tempat persinggahan, mereka selalu mengatakan “kapan tibo”. Kata Tibo inilah yang kemudian hari menjadi cikal kata Tebo. Muara dari sungai tersebut dinamakan oleh mereka Muara Tebo.

Terwujudnya pemekaran Kabupaten Tebo dengan masing-masing 6 kecamatan. Kecamatan tersebut adalah Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, KP Sumay dan KP VII Koto. Luas wilayah Kabupaten Tebo adalah 6461 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan data Kabupaten Tebo dalam angka tahun 1999 saat pemekaran jumlah penduduk

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pak M.Hatta S.Sos selaku Asisten Administrasi Umum setda Kabupaten Tebo pada tanggal 12 Agustus 2016 di Muara Tebo

<sup>11</sup> Wawancara dengan Drs. H.A. Madjid Mu'az yang merupakan Bupati Carateker Kabupaten Tebo pada tanggal 7 September 2016 di Kota Jambi

Kabupaten Tebo berjumlah 224.944 jiwa. Awal terbentuknya Kabupaten Tebo terus melakukan pemekaran daerah kecamatan. Pada tahun 2003 Kabupaten Tebo sudah memiliki 9 kecamatan dengan 3 tambahan kecamatan baru yaitu Kecamatan Rimbo Ulu, Rimbo Ilir dan Tengah Ilir. Di Tahun 2004 Kabupaten Tebo terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 3 kecamatan baru yakni Kecamatan Muara Tabir, Serai Serumpun dan VII Koto Ilir.

Setelah itu Kabupaten Tebo berkembang dengan 12 kecamatan tersebut dengan masing-masing ibukotanya yaitu, Tebo Tengah beribukota di Muara Tebo, Rimbo Bujang beribukota di Wirotho Agung, Rimbo Ilir beribukota di Karang Dadi, Rimbo Ulu beribukota di Suka Damai, VII Koto beribukota di Sungai Abang, VII Koto Ilir beribukota di Balai Rajo, Sumay beribukota di Teluk Singkawang, Serai Serumpun beribukota di Sekutur Jaya, Tengah Ilir beribukota di Mengupeh, Tebo Ulu beribukota di Pulau Temiang, Tebo Ilir beribukota di Sungai Bengkal dan Muara Tabir beribukota di Pintas Tuo.

## **Faktor Pendukung dan Penghambat Kabupaten Tebo**

### **1. Faktor Pendukung**

- Kabupaten Tebo merupakan wilayah sejarah lama yang sering dijadikan pusat pemerintahan.
- Kabupaten Tebo memiliki sumber daya alam yang potensial.
- Sektor pertanian Kabupaten Tebo berkembang dengan baik.
- Luas wilayah Kabupaten Bungo Tebo yang mencapai kurang lebih 20% dari luas Provinsi Jambi dianggap tidak proporsional dan optimal dalam pengembangan wilayah. Karena itu sepatutnya dimekarkan.
- Daerah perkantoran pusat cukup jauh bagi warga yang tinggal di pelosok, dengan pemekaran maka dapat membuat jarak lebih dekat.
- Jumlah penduduk yang sudah memenuhi syarat untuk pemekaran Kabupaten Tebo, sehingga dapat mendukung proses pemekaran terjadi.

### **2. Faktor Penghambat**

- Susunan ruang kota belum selayaknya kabupaten saat proses pemekaran.
- Kantor-kantor kelembagaan belum terbentuk di wilayah Kabupaten Tebo saat proses pemekaran.

## **Dampak Pemekaran Kabupaten Tebo**

### **1. Dampak Positif**

- Pelayanan publik sudah dapat dikatakan baik.
- Adanya perkembangan ekonomi yang signifikan.
- Luas daerah yang tidak terlalu luas memudahkan pemerintah daerah mengelola daerahnya.
- Lebih fokus mengembangkan berbagai potensi sumber daya alam.
- Meningkatnya infrastruktur yang ada di Kabupaten Tebo
- Memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan.

## 2. Dampak Negatif

- Kurangnya pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam di Kabupaten Tebo
- Terjadinya konflik akibat dari tidak setujunya masyarakat/pemerintah daerah

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Sejarah Pemekaran Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (1999-2015), maka penulis akan mencoba memberikan kesimpulan dan rekomendasi guna melengkapi penelitian sebagai berikut.

### Simpulan

1. Kabupaten Tebo memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Kabupaten Tebo menjadi daerah bagian kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Budha. Merupakan daerah Afdeeling pada saat penjajahan Belanda. Daerah Kabupaten Tebo juga pernah menjadi pusat ibukota Kabupaten Merangin dan menjadi Daerah Pembantu Bupati Wilayah Timur saat masih dalam wilayah Kabupaten Bungo Tebo. Dilihat dari latar belakang yang sudah lama menjadi suatu pusat daerah, Kabupaten Tebo dianggap layak untuk menjadi sebuah kabupaten. Masyarakat memberikan aspirasi agar Kabupaten Tebo dapat dimekarkan menjadi Kabupaten. Hal ini didukung pula oleh pemerintah Kabupaten Bungo Tebo dan pemerintah Provinsi Jambi sehingga proses pemekaran Kabupaten Tebo berjalan dengan cepat sampai dikeluarkannya UU Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Peran masyarakat dalam memekarkan Kabupaten Tebo sangat besar. Masing-masing perwakilan masyarakat di masing-masing kecamatan mengirimkan aspirasi mereka agar Kabupaten Tebo segera dimekarkan. Pihak pemerintah pun mendukung dan menanggapi dengan cepat hal tersebut sehingga Pemekaran Kabupaten Tebo dapat berjalan dengan baik.
3. Kabupaten Tebo lahir pada 12 Oktober 1999 dengan 4 kecamatan dan 2 kecamatan pembantu. Luas wilayah Kabupaten Tebo adalah 6.461 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk di tahun 1999 berjumlah 224.944 jiwa.
4. Faktor pendukung Kabupaten Tebo layak dijadikan Kabupaten karena Kabupaten Tebo merupakan wilayah sejarah lama yang sering dijadikan pusat pemerintahan. Selain itu Kabupaten Tebo memiliki sumber penghasilan utama yang baik dari sektor pertanian dan memiliki sumber daya alam yang potensial. Kabupaten Tebo juga dalam proses rencana pemekarannya tidak memiliki kendala karena mendapat dukungan baik dari masyarakat maupun pihak pemerintah. Faktor penghambat dalam pembentukan Kabupaten Tebo hampir tidak ada. Hanya saja jika sudah menjadi Kabupaten maka tentu harus punya lembaga pemerintahan untuk melayani masyarakat. Kabupaten Tebo sendiri belum memiliki kantor-kantor kelembagaan akan tetapi hal tersebut dapat diselesaikan oleh bantuan pihak pemerintah Kabupaten Bungo Tebo sehingga tidak terjadi kendala dalam memekarkan Kabupaten Tebo.

## Rekomendasi

1. Perlu adanya kajian dan penelitian mendalam tentang sejarah Kabupaten Tebo di masa lalu agar banyak orang yang mengetahui bahwa Tebo merupakan wilayah sejarah lama yang memiliki banyak peninggalan-peninggalan bersejarah. Hal ini pula dapat menambah pengetahuan buat masyarakat dan generasi penerus untuk mengenal sejarah daerahnya sendiri, sebab sejarah merupakan cerminan untuk masa yang akan datang.
2. Perlunya tindakan pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan Tebo agar dapat berkembang lebih pesat lagi dari sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memiliki sikap profesional dan gagasan atau inovasi untuk meningkatkan sumber daya manusia baik melalui pelatihan atau membuka lapangan usaha baru untuk generasi muda yang akan berperan dalam pembangunan kabupaten selanjutnya.
3. Banyak potensi-potensi yang belum tergali di Kabupaten Tebo ini agar dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Contohnya potensi pariwisata yang belum dikenal banyak oleh masyarakat maupun wisatawan. Diperlukan peran pemerintah daerah untuk daerah wisata dapat diketahui kalangan masyarakat luas, salah satu gagasan yang mungkin dapat diambil adalah dengan dibukanya kantor dinas pariwisata.
4. Masyarakat sangat diharapkan berperan membantu dalam membangun Kabupaten Tebo bersama. Saling mendukung dan bekerjasama terhadap inovasi baru para pemerintah daerah akan membuat pembangunan dapat berjalan lebih baik. Diharapkan pula bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan lahan pertanian yang ada, serta lestarikan potensi alam kabupaten sehingga tidak disia-siakan apa yang dianugerahkan Tuhan untuk Kabupaten Tebo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Saudagar, Fachruddin. 1992. *Perkembangan Kerajaan Melayu Kuno di Jambi*. Jambi: Pemda Tingkat I Jambi
- Yeni Desmalisa. 2010. *Sejarah Lahirnya Kabupaten Lingga Provinsi Riau tahun 1999-2003*. Pendidikan Sejarah, FKIP. Universitas Riau (UR)
- Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. 1983. *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Jambi*. Jakarta: Proyek-proyek dan Dokumentasi Sejarah Nasional
- DHC Angkatan 45 Bungo Tebo. 1995. *Rakyat Bungo Tebo Berjuang Mempertahankan Kemerdekaan*. Muara Bungo. DHC Angkatan 45 Dati II Bungo Tebo
- Muljana, Slamet. 1981. *Kuntala, Sriwijaya dan Swarnabhumi*. Jakarta: Yayasan Idayu
- Muljana, Slamet. 1983. *Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit*. Jakarta: Inti Idayu Press

Mukti,Zubir. 1987. *Sejarah Peranan Hukum Adat dan Adat Istiadat Jambi*. Muara Bungo

Pemda Bungo Tebo. 1999. *Pemantapan Data Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo menjadi Daerah Tingkat II Bungo dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tebo*. Muara Bungo : Pemda Bungo Tebo

Sidi Maharajo, Suhaimi. 1993. *Kerajaan Dharmasraya*. Batang Arau Batipuah Baruah: Limbago

### **DAFTAR WAWANCARA**

Wawancara dengan bapak M. Hatta, S.Sos tanggal 12 Agustus 2016

Wawancara dengan bapak Drs. H. A. Madjid Mu'az tanggal 07 September 2016